

## ABSTRAK

Pekerja di kawasan industri biasanya dihadapkan pada tantangan seperti jam kerja panjang, kondisi kerja yang berisiko, dan seringkali tidak memperoleh perlindungan yang memadai terkait hak-hak ketenagakerjaan. Di kawasan industri, pekerja memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, namun sering kali terpapar pada ketidakpastian status kerja, terutama jika mereka terikat pada kontrak jangka pendek atau outsourcing. Seiring dengan berkembangnya sektor industri, seringkali hak-hak pekerja terabaikan demi mengejar efisiensi dan profit, yang mengarah pada ketimpangan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan prinsip HAM berbasis keadilan bermartabat, yang mencakup pemenuhan hak-hak dasar pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, serta kebebasan berserikat. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis, meningkatkan citra perusahaan, dan menciptakan hubungan industri yang harmonis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hak asasi manusia berbasis keadilan bermartabat dalam pelaksanaan bisnis di kawasan industri Makassar. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan responden yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang saling berinteraksi, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan holistik mengenai penerapan keadilan bermartabat dalam konteks bisnis dan ketenagakerjaan di kawasan industri Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bisnis dan HAM berbasis keadilan bermartabat bagi pekerja di kawasan industri Makassar sangat krusial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Dengan memenuhi hak-hak dasar pekerja, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman, akan terbentuk suasana kerja yang produktif dan kondusif. Penerapan prinsip keadilan bermartabat tidak hanya mendukung kelangsungan bisnis, tetapi juga memperbaiki reputasi perusahaan dan mendorong pertumbuhan industri yang lebih beretika dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya memperkuat hubungan industri yang harmonis, mengurangi risiko konflik, serta menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi pekerja dan pengusaha. Masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS, serta mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga memperburuk kondisi ini, dengan pekerja enggan melaporkan pelanggaran karena takut akan intimidasi atau kehilangan pekerjaan. Dalam mengatasi hal ini, perlu peningkatan pengawasan, edukasi hak-hak pekerja, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum berbasis keadilan bermartabat melalui regulasi seperti UU Cipta Kerja dan peraturan daerah diharapkan dapat menjamin hak pekerja atas upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.

**Kata kunci : Bisnis dan HAM, Keadilan Bermartabat dan Kawasan Industri Makassar**